

PAD MASUK RP 978.904.500.

Parangtritis Masih Menjadi Primadona Tujuan Wisatawan

BANTUL (KR) - Selama musim libur Lebaran 2024, objek wisata pantai selatan wilayah Bantul menjadi sasaran tujuan wisata dari berbagai daerah. Terutama Pantai Parangtritis hingga saat ini masih menjadi primadona tujuan wisata.

Menurut Kasi Promosi Kepariwisata Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi, sesuai laporan yang masuk hingga Minggu (14/4) pukul 18.00, jumlah pengunjung pantai selatan Bantul sebanyak 102.928 orang. Jumlah tersebut yang mengunjungi Parangtritis sebanyak 75.843 orang dan

yang di pantai wilayah barat 26.249 orang. Dari jumlah tersebut, distribusinya masuk PAD sebesar Rp 978.904.500.

Markus mengatakan, sesuai prediksi semula, pada liburan Lebaran 2024 tahun ini dipastikan wilayah Bantul menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang datang ke DIY, ter-

masuk para pemudik. "Pantai Parangtritis memang sejak dulu menjadi tujuan utama wisata di Bantul," katanya.

Diungkapkan Markus, puncak kunjungan wisatawan Lebaran 2024 masuk Bantul terjadi pada Minggu (14/4). "Senin kemarin pengunjung sudah mulai landai," imbuhnya.

Tidak hanya kawasan pantai saja yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Di Bantul masih cukup banyak lokasi yang menjadi tujuan wisata. Seperti di hutan Dlingo, pusat ke-

rajinan dan destinasi wisata budaya. Hingga Sabtu (13/4) di Dlingo tercatat ada 7.386 pengunjung ke Pinus Sari, 4.020 ke Hutan Pinus Pengger, dan 3.057 pengunjung ke Puncak Becici.

Destinasi wisata di Bantul yang hingga saat ini masih minim pengunjungnya di antaranya Goa Selarong dan Cerme. "Objek wisata Goa Selarong dan Goa Cerme ini perlu ada upaya bagaimana bisa menarik pengunjung," pungkask Markus.

(Jdm)-f



KR-Judiman

Pantai Parangtritis masih menjadi primadona tujuan wisata di Bantul.

SEKDA BANTUL BACA IKRAR SYAWALAN

Hari Pertama Masuk Kerja, Gelar Halal Bihalal

BANTUL (KR) - Setelah menjalani libur cuti bersama dan libur Idul Fitri 1445 H/2025 M selama 9 hari, semua ASN di Kabupaten Bantul kembali masuk kerja, Selasa (16/4). Hari pertama masuk kerja, Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih bersama jajaran Forkompimkab Bantul dan TNI-Polri menggelar acara silaturahmi dan halal bihalal di halaman Pendapa Parasmya Komplek Pemkab Bantul.

Sekda Bantul Agus Budiraharjo SKM MKes dalam kesempatan tersebut membacakan ikrar syawalan mewakili seluruh ASN di Bantul. Sekda berkomitmen untuk saling



KR-Judiman

Bupati Bantul menerima jabat tangan dari ASN di Bantul

mendukung dan menghargai sama lain demi mencapai kesuksesan bersama. "Sebab kami percaya bahwa solidaritas dan landasan yang kokoh adalah

kunci utama untuk mengatasi setiap tantangan dan meraih prestasi. Semoga ikrar ini menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat per-

saudaraan dan semangat kita semua," paparnya.

Sementara Bupati H Abdul Halim Muslih mengemukakan, untuk memperkuat tali silaturahmi, sinergi dan kolaborasi seluruh keluarga besar Pemkab Bantul agar layanan kepada masyarakat semakin prima. "Saya berharap agar para pegawai berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menabrak rambu-rambu atau aturan yang berlaku agar tidak terlibat permasalahan hukum. Saya juga minta agar para pegawai mampu berprestasi dengan baik," ujarnya.

(Jdm)-f

BOLOS DI HARI PERTAMA KERJA

Satu ASN Terancam Pemotongan TPP

SLEMAN (KR) - Sedikitnya satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sleman terancam saksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, ASN tersebut diketahui tidak masuk pada hari pertama kerja usai cuti lebaran.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Budi Pramono kepada wartawan usai melakukan pemantauan pada hari pertama masuk kerja, Selasa (16/4). "Pada hari pertama masuk kerja setelah cuti lebaran ada 94 pegawai di lingkup Pemkab Sleman tidak masuk. Berdasarkan penelusuran, 88 pegawai tidak masuk karena cuti, lima orang menjalani Work From Home (WFH) dan seorang tidak masuk kerja tanpa keterangan alias bolos," ujarnya.

Menurut Budi, meski ada puluhan pegawai yang tidak masuk, namun mayoritas sudah meminta izin. Sementara pe-

gawai yang bolos masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sehingga terancam sanksi. Adapun sanksinya, selain dilakukan pembinaan oleh atasannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga terancam pemotongan TPP yang diperoleh setiap bulannya. "Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi pegawai yang bolos akan dipotong jatah TPP yang diperoleh," jelasnya.

Disinggung mengenai hasil sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik di lingkup Pemkab, Budi Pramono menyebutkan pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris BKPP. Berdasarkan laporan yang diterima, dipastikan pelayanan yang didatangi sudah berjalan seperti biasa, namun pemohon pelayanan belum berjalan seperti sebelum liburan berlangsung. "Meski masih sepi, tapi bukan masalah karena terpengerti pelayanan sudah dibuka saat hari pertama kerja sesuai lebaran," tambah Budi. (Has)-f

KOORDINASI LINTAS SEKTOR CUKUP BAIK

Arus Lalu Lintas Selama Lebaran Lancar

SLEMAN (KR) - Dinas Perhubungan Sleman belum melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan penyelenggaraan libur Lebaran di tahun ini. Namun dipastikan pelaksanaan libur lebaran di Sleman dapat berjalan dengan lancar.

"Kami pastikan pelaksanaan libur Lebaran 2024 berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini tak lepas adanya koordinasi yang baik antarsektor mulai dari pemkab, Pemerintah DIY, kepolisian, TNI hingga instansi lainnya," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Sleman Arip Pramana kepada wartawan, Selasa (16/4).

Diakui, kondisi arus lalu lintas di Sleman memang sempat ada kepadatan, tapi berhasil diatasi dengan rekayasa lalu lintas yang telah dipersiapkan. Sehingga secara umum libur Lebaran tahun ini berjalan dengan baik.

Arip menjelaskan, untuk pintu masuk Sleman terbagi menjadi tiga, di antaranya Prambanan, Tempel dan Jalan Wates. Secara umum, pintu masuk Prambanan menjadi paling ramai diban-

dingkan dengan yang lainnya. "Untuk data detailnya yang melakukan perhitungan pasti ada di Dinas Perhubungan DIY, tapi, ketimbang penyelenggaraan tahun lalu pos Prambanan ada peningkatan signifikan," ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan laju arus kendaraan di Prambanan tak lepas adanya pembukaan secara fungsional tol Jogja-Solo di Klaten. "Untuk pintu masuk di Tempel dan Jalan Wates juga ada kenaikan, tapi tidak sebanyak di pos Prambanan," beber Arip.

Ditambahkan, penyelenggaraan libur lebaran yang berjalan dengan baik tak lepas dari kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah DIY, kepolisian, TNI, PMI hingga instansi lainnya. Selain itu, sebelum penyelenggaraan juga dilakukan pemetaan kerawanan serta adanya penyiapan jalur utama maupun alternatif yang bisa diakses secara luas oleh pemudik. "Tentunya di jalur-jalur alternatif kami lengkapi dengan papan penunjuk arah yang bisa membantu pengendara menuju lokasi yang dituju," pungkask Arip. (Has)-f

Reuni IV SMA Muhammadiyah Imogiri 84

BANTUL (KR) - Kegiatan reuni IV Alumni SMA Muhim 1984 digelar, Minggu (14/4). Momentum juga dilaksanakan pada syawalan Idul Fitri 1445 H dihadiri alumni SMAM Muhim yang berdomisili menyebar di beberapa Kota/Kepulauan Indonesia, antara lain Semarang, Solo, Jakarta, Sumatera, Kalimantan hingga Papua.

Ketua Alumni SMA Muhim Suhardi mengapresiasi kepada seluruh alumni SMA Muhim 1984 karena sudah berkontribusi baik berupa tenaga, pikiran juga dana. Sehingga reuni IV tahun 2024 bisa terlaksana dengan lancar. "Tujuan reuni IV ini untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus merefleksikan masa-masa me-

nuntut ilmu dibangun SMA Muhim 40 tahun lalu," ujarnya.

Reuni IV Alumni SMA Muhim dan Syawalan digelar di Jalan Imogiri Timur Singosaren Wukirsari Imogiri. Dalam diskusi sejumlah gagasan muncul mulai adanya pertemuan rutin dengan sejumlah kegiatan diantaranya penggalangan dana sosial. Kegiatan Alumni SMA Muhim 84 tidak hanya sebatas reuni dan syawalan. Tetapi

kunjungan silaturahmi bapak/ibu guru, baik di sekolah belum lunas. Jadi tidak juga silaturahmi kepada lam suasana suka maupun duka. (Roy)-f



KR-Sukro Riyadi

Kegiatan syawalan alumni SMA Muhim 84.

BUPATI BERHARAP KPM BANYAK YANG LULUS

Digelontor Rp 18,2 M, Jangan Jadi Jamila

SLEMAN (KR) - Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan nasional, demikian pula di Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 18,2 miliar pada tahun 2024 dari rencana Rp 104,6 miliar.

"Tahun 2024 kita telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 18,2 miliar. Rencananya tahun ini kita akan menyalurkan bantuan Rp 104,6 miliar kepada 37.834 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Bupati Sleman Kustini di Sleman, Selasa (16/4).

Terkait itu, Bupati mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta berperan lebih dalam rangka per-



KR-Istimewa

Bupati Sleman Kustini

cepatan penurunan kemiskinan. "Saya harap tahun ini kita dapat meluluskan

upaya memberikan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 3 juta kepada KPM PKH Graduasi dengan alokasi usaha sejumlah 100 KPM di tahun 2024," jelas Bupati.

Bupati juga telah menyerahkan secara simbolis sertifikat serta bantuan sembako kepada KPM dan pendamping PKH. Bantuan tersebut antara lain sembako dari program CSR DPD REI, serta sertifikat dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman kepada KPM.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sleman Mustadi menambahkan, pendamping PKH jumlah SDM Pelaksana sejumlah 180 orang yang terdiri dari 2 Koordinator tingkat Kabupaten dan 178 Pendamping PKH. Adapun masing-masing pendamping mendampingi sekitar 200-300 Keluarga Penerima PKH. (Has)-f

lebih banyak KPM dan mengawalnya agar tidak bergastawana atau tidak mengastawana. Kami ber-

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Usulkan Kemudahan Mekanisme JPS

SLEMAN (KR) - Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tahun 2024 sebesar Rp 15 miliar atau naik sekitar Rp 2,5 miliar dibandingkan tahun 2023. Kenaikan anggaran itu merupakan usulan dari DPRD Sleman. Selain kenaikan anggaran, diharapkan juga diimbangi kemudahan mekanisme JPS karena program tersebut sangat bermanfaat bagi warga miskin dan rentan miskin.

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar Indra Bangsawan SE mengatakan, tahun ini memang anggaran JPS sudah ada kenaikan. Namun Indra mengusulkan pada perubahan nanti, untuk menambah anggaran JPS kembali. "Dengan situasi ekonomi yang sulit diprediksi, program JPS sangat membantu masyarakat miskin dan rentan miskin. Jadi perlu ditambah lagi anggarannya," katanya, Selasa (16/4).

Indra menjelaskan, dana JPS bisa digunakan untuk bantuan pendidikan siswa sekolah dan mahasiswa, biaya kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Selain mendorong penambahan alokasi anggaran JPS, Indra juga mengimbau pemerintah daerah mempermudah mekanisme pencairannya bagi warga yang membutuhkan.

Menurutnya, percepatan mekanisme pencairan JPS sangat penting. Hal itu dikarenakan saat ini antrean pemohon JPS mencapai ribuan orang. Khususnya pemohon bantuan pendidikan untuk membayar tunggakan biaya sekolah. "Bantuan pendidikan JPS saat ini sesuai aturan memang hanya bisa untuk membayar tunggakan biaya sekolah siswa dari keluarga tidak mampu. Atau untuk peng-

ambilan ijazah siswa yang tertahan di sekolah karena biaya sekolah belum lunas. Jadi tidak bisa untuk bayar biaya sekolah tahun berjalan," ujar kader muda Partai Golkar asal Kapanewon Turi ini.

Diterangkan Indra, kebijakan tersebut berlaku bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK/ sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta. Termasuk siswa yang sekolah di luar Sleman. Terkait hal ini, orang tua siswa yang bersangkutan wajib ber-KTP Sleman. Sedangkan untuk pengambilan ijazah yang tertahan di sekolah, lanjut Indra, dibatasi hanya sampai lima tahun setelah kelulusan.

"Syarat pencairan JPS pendidikan untuk siswa lebih mudah. Cukup menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kalurahan," terang anggota Komisi D ini.

Bantuan JPS pendidikan untuk pembayaran tunggakan biaya sekolah maksimal Rp 5 juta. Berbeda dengan mahasiswa dari keluarga miskin. Nilai bantuan JPS pendidikan untuk mahasiswa maksimal Rp 7,5 juta. Peruntukannya juga lebih luas. Bisa untuk biaya pendaftaran calon mahasiswa baru dan biaya semesteran untuk mahasiswa aktif. "Namun, syaratnya lebih ketat. Mahasiswa yang bersangkutan harus memiliki kartu keluarga miskin (KKM) atau kartu keluarga rentan miskin (KKRM) Kabupaten Sleman dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, mahasiswa penerima bantuan JPS pendidikan di perguruan tinggi negeri minimal IPK 2,75. Sedangkan di perguruan tinggi swasta IPK minimal 3,00," pungkask Indra. (Sni)-f